

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mengupayakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan atau memenuhi kepentingan nasional negaranya. Burchill, 2005 dalam bukunya yang berjudul “*The National Interest in International Relations Theory*” memberikan pandangan mengenai kepentingan nasional dari berbagai perspektif teori hubungan internasional, salah satunya dari teori liberal-institusionalisme dan marxisme yang memberikan pandangan yang berbeda dengan teori realisme yang mengusung konsep *power*. Lebih jauh, konsep kepentingan nasional diartikan bukan terletak pada keamanan negara, melainkan pada stabilitas ekonomi dan pasar yang harus dijadikan acuan, lebih jauh, dapat diartikan bahwa kepentingan nasional yang dicapai adalah berjalannya mekanisme pasar.

Salah satu upaya memenuhi kepentingan tersebut dilakukan melalui mekanisme kerja sama. (Umar Suryadi, 2017) Konsep kerja sama sendiri menjadi perhatian utama bagi disiplin akademis hubungan internasional yang dilakukan sebagai perwujudan pembangunan kedamaian dunia (*to build world peace*) dan guna mencegah terjadinya perang (*to prevent war*). Kerja sama digambarkan sebagai suatu pola hubungan saling ketergantungan yang dibentuk oleh negara-negara dalam sistem internasional yang anarki. Kerja sama yang terjalin tersebut pun dapat menggambarkan adanya hubungan baik yang telah terjalin saling menguntungkan di antara kedua negara dan dapat memperkuat ikatan politik

diantara kedua negara, ekonomi bahkan budaya dan sumber daya manusia kedua negara. Jenis-jenis kerja sama dapat berupa kerja sama diantara dua negara atau kerja sama bilateral, kerja sama dengan banyak negara atau multilateral serta kerja sama regional yang merupakan kerja sama yang terdiri dari beberapa negara dalam Kawasan. Bentuk kerja sama yang paling banyak dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain yaitu kerja sama bilateral. Hubungan bilateral sendiri secara prinsip sering kali merujuk pada ikatan di antara kedua negara yang melakukan perjanjian kerja sama. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan data bahwa sampai dengan periode tahun 2019 Indonesia telah memiliki 162 perjanjian bilateral dengan berbagai negara di dunia (Kementerian Luar Negeri, 2022).

Indonesia telah melakukan hubungan kerja sama dengan beberapa negara lain dalam kawasan Amerika Latin. Secara ekonomi, interaksi Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Amerika Latin pun telah dilakukan. Amerika latin sendiri merupakan kawasan yang terdiri dari 33 negara dengan total luas wilayah kawasan tersebut mencapai 42.292.000 km² dan dihuni oleh sekitar 634 juta jiwa (estimasi tahun 2015). Interaksi ekonomi tersebut dilakukan dengan negara Argentina, Brazil dan Chile. Dengan Argentina, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, Indonesia dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun tahun 2022 neraca perdagangan Indonesia cenderung negatif terhadap Argentina yang artinya jumlah impor yang dilakukan oleh Indonesia lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah ekspor Indonesia ke Argentina. Adapun peningkatan jumlah impor yang dilakukan oleh Indonesia cenderung meningkat

setiap tahunnya dalam periode dimaksud. Sementara, produk yang menjadi komoditi dalam interaksi kedua negara tersebut didominasi oleh sektor non migas.

Interaksi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Brazil untuk periode tahun 2015 sampai dengan 2017 secara garis besar hampir sama dengan interaksi ekonomi Indonesia dengan Argentina yakni di dominasi dengan impor yang dilakukan oleh Indonesia sehingga neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit untuk periode tahun tersebut yang tetap defisit sampai dengan periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan kemudian diolah kembali oleh Kementerian Perdagangan, estimasi neraca perdagangan antara Indonesia dengan Brazil diestimasikan defisit untuk periode tahun 2018 sampai dengan 2022 sekitar 31,95 % walaupun sampai dengan saat ini untuk kawasan Amerika Selatan, Brazil masih menjadi negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar.

Dalam laman informasi Kementerian Luar Negeri menyampaikan salah satu yang menjadi mitra kerja sama Indonesia dengan negara lain adalah dengan negara Chile. Senada dengan keterangan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dalam laman informasinya pun menyampaikan beberapa informasi bahwa Indonesia dan Chile tercatat telah beberapa kali terlibat dalam forum kerja sama internasional bersama secara aktif, diantaranya dalam Gerakan Non-Blok, APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation Indonesia*) serta forum kerja sama FEALAC (*Forum for East Asia-Latin America Cooperation*). Dalam laman informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Chile yang merupakan laman terintegrasi dengan laman Kementerian Luar Negeri, diperoleh informasi bahwa

Indonesia dan Chile telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1965 yang ditandai dengan dibukanya kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, Ibukota Chile pada tahun 1991. Sedangkan Chile pun membuka kantor perwakilan diplomatiknya di Ibu kota Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Selama periode sejak berjalannya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Chile telah dilakukan kunjungan kenegaraan oleh Presiden Indonesia ke Chile pada tahun 2000 dan Presiden Republik Chile ke Indonesia pada tanggal 11-12 Mei 2017.

Sedangkan untuk Chile yang merupakan salah satu negara yang paling baik dalam pertumbuhan ekonominya yang salah satunya ditunjukkan dengan indikator *ease of doing business* yang ada diperingkat 57 untuk tahun 2016, interaksi ekonomi yang terjadi dengan Indonesia bersifat fluktuatif. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik untuk periode tahun 2012 sampai dengan periode tahun 2016. Untuk periode tahun 2014 sampai periode tahun 2015 Indonesia mengalami defisit sedangkan tahun 2016 mulai mengalami neraca perdagangan yang positif. Selanjutnya, untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan asumsi telah diusungnya kerja sama Indonesia dengan Chile dalam kerangka kerja sama CEPA, neraca perdagangan Indonesia cenderung dominan positif kecuali untuk tahun 2019 dimana saat tersebut adalah saat awal berlakunya Indonesia –Chile CEPA yang bersamaan dengan adanya situasi awal pandemi Covid-19 yang menjadi pandemi global yang mengganggu perkembangan sektor ekonomi terutama dalam perdagangan. Secara garis besar, neraca perdagangan Indonesia dengan Chile untuk periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, kecuali tahun 2019, dengan data yang berhasil dihimpun dari Badan Pusat Statistik yang

kemudian diolah kembali oleh Kementerian Perdagangan, nilai neraca perdagangan Indonesia dengan Chile untuk tahun 2018 senilai 43,9 juta US\$, tahun 2019 negatif 22,4 juta US\$, tahun 2020 meningkat kembali menjadi 35,9 juta US\$, tahun 2021 meningkat pesat menjadi 94,2 juta US\$ dan tahun 2022 pun meningkat menjadi 125,3 juta US\$.

Berdasarkan tren yang terjadi pada interaksi ekonomi antara Indonesia dengan Chile khususnya pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan volume pada tahun 2020 sekitar 253,7 juta US\$, tahun 2021 meningkat menjadi 424,6 juta US\$ dan tahun 2022 lebih meningkat menjadi 584 juta US\$ dan nilai neraca perdagangan Indonesia yang dominan positif, yang diartikan secara transaksi, Indonesia lebih banyak melakukan ekspor dari pada impor terhadap Chile. Peningkatan tersebut dapat diindikasikan dilatarbelakangi dengan telah diimplementasikannya Indonesia-Chile CEPA yang memberikan pengurangan tarif bea masuk atas barang-barang komoditi kedua negara yang dilakukan secara bertahap sampai dengan 0% sampai dengan periode tahun 2031, asumsinya dengan terus dilakukannya pengurangan tarif bea masuk tersebut diharapkan terdapat peningkatan akan volume maupun neraca perdagangan Indonesia sebagai manfaat atas pemberlakuan Indonesia Chile CEPA dimaksud. Produk-produk yang menjadi komoditi ekspor unggulan dari Indonesia ke Chile adalah *fertilizer, motor cars, footwear, organic surface-active agents, locust beans, sugar beet seaweed* dan *sugar cane*. Sedangkan beberapa produk Chile yang menjadi komoditi utama yang diimpor oleh Indonesia meliputi *grapes, chemical wood pulp, copper, iron ores,* dan *fats and oil and their fractions of fish or marine mammals*.

Berdasarkan informasi Kementerian Perdagangan, Indonesia dan Chile telah memulai kerja sama bilateralnya khususnya dalam sektor ekonominya melalui kesepakatan yang mulai diinisiasi sejak tahun 2006 yang dikembangkan lebih lanjut dengan *menyepakati Joint Study Group (JSG)* tahun 2009 kemudian tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Indonesia dan Chile melakukan pembahasan atas hasil JSG. Tahun 2012 akhirnya Indonesia dan Chile menyepakati pembentukan perjanjian perdagangan yang secara garis besar mencakup mekanisme penghilangan hambatan tarif perdagangan yang kemudian disempurnakan melalui kerja sama perdagangan dengan skema *Comprehensive Partnership Agreement (CEPA)*. Secara umum, skema kerja sama melalui CEPA dilakukan melalui pelembagaan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian bilateral, multilateral maupun regional yang biasanya mencakup berbagai isu yang luas, misalnya isu terkait dengan perdagangan baik barang maupun perdagangan jasa, isu terkait dengan investasi, cakupan tentang kerja sama teknologi, sampai dengan isu terkait dengan perpajakan yang tidak bisa dipungkiri turut menjadi elemen penting dalam suatu perdagangan. Kerja sama Indonesia dengan berbagai negara dalam skema CEPA yang secara luas mencakup berbagai isu dapat ditemui misalnya dalam perjanjian CEPA antara Indonesia dengan Australia, CEPA antara Indonesia dengan Jepang, ataupun misalnya CEPA ASEAN dengan Jepang dan beberapa negara lainnya. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa kerja sama Indonesia dengan Chile merupakan kerja sama bilateral pertama Indonesia dengan negara Amerika Selatan atau Amerika Latin. Yang menjadi berbeda dengan kerja sama ekonomi yang disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra lainnya adalah bahwa

kerja sama ekonomi dalam skema CEPA antara Indonesia dengan Chile ini baru terbatas pada cakupan perdagangan barang yang telah diberlakukan dan perdagangan jasa yang baru selesai disepakati secara substansi.

Kementerian Perdagangan dalam laman informasinya menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-Chile CEPA untuk perundingan awal atau putaran pertama dilakukan pada tahun 2014 bertempat di Santiago, Chile. Perundingan tersebut kemudian sempat tertunda karena pada tahun bersamaan Indonesia sedang dalam masa peralihan pemerintahan. Perundingan kembali dilakukan tahun 2017 dan menyepakati semua cakupan substansi dalam Indonesia-Chile CEPA tanggal 6-10 November 2017. Dengan telah ditandatanganinya Indonesia-Chile CEPA oleh kedua negara tanggal 14 Desember 2017 dan telah selesainya proses ratifikasi oleh kedua negara pada 19 Februari 2019, melakukan pertukaran *Instrument of Ratification* tanggal 11 Juni 2019 dan mulai berlaku mulai 10 Agustus 2019 maka penyesuaian ketentuan dalam rangka implementasi Indonesia-Chile perlu dilakukan agar implemenasinya sesuai dengan yang diharapkan atau berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi kedua negara. Indonesia menerbitkan beberapa peraturan pelaksana diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal barang untuk Barang Asal Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105/PMK.010/2019 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, PMK No.80/PMK.04/2021

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Chile. Skema pengurangan tarif perdagangan yang disepakati berdasarkan Indonesia-Chile CEPA adalah sejumlah 7.669 pos tarif bea masuk untuk produk Indonesia dihapuskan oleh Chile serta sebanyak 6.704 pos tarif mulai langsung diberlakukan dengan tarif 0 persen, dan 965 tarif akan dihapuskan secara bertahap sampai dengan tahun 2025 (Kementerian Perdagangan, 2022). Diharapkan dengan berlakunya Indonesia Chile CEPA dapat menjadi instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan serta perkembangan ekonomi yang dapat meningkatkan peluang penciptaan kerja dan bisnis diantara kedua negara, mendorong kerja sama di bidang potensial lainnya, memberikan stimulus bagi Indonesia agar dapat melihat potensi pasar dan ekspor Indonesia di Amerika Latin dengan Chile sebagai hubnya dengan pertimbangan diantaranya bahwa Chile jika dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Amerika Selatan dilihat dari moda transportasi yang digunakan jika melewati samudera pasifik relatif lebih terjangkau dari kawasan Asia. Selain itu, Chile juga merupakan bagian dari *Pacific Alliance* yang dikenal lebih terbuka dalam kerja sama dagang dengan negara luar. (Kementerian Luar Negeri 2017).

Adapun beberapa produk Indonesia yang bertarif 0 persen berdasarkan Indonesia Chile CEPA diantaranya adalah beberapa komoditi pertanian seperti kelapa sawit, kopi, teh, pisang dan brokoli. Beberapa produk perikanan seperti ikan tuna, lobster, udang, kepiting dan juga ubur ubur serta beberapa produk manufaktur seperti alas kaki, ban, tekstil, perhiasan dan peralatan militer. Sedangkan produk Chile yang berdasarkan Indonesia Chile CEPA mendapatkan tarif 0 persen di

Indonesia diantaranya adalah beberapa produk pertanian dan perikanan seperti apricot, anggur, sotong dan kerang. Beberapa produk pertambangan seperti tembaga, minyak bumi dan gas batu bara serta beberapa produk industri seperti kayu gergaji, bahan kimia, kendaraan bermotor dan jus buah juga mendapatkan tarif 0 persen.

Kebijakan luar negeri Indonesia khususnya dalam diplomasi ekonomi yang diambil sejak periode pertama dan periode kedua dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan memberikan gambaran bahwa Indonesia membuka diri atas kesempatan kerja sama ekonomi yang dicermati dengan disepakatinya perjanjian kerja sama ekonomi baik bilateral misalnya yang tampak dengan telah disepakatinya Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), secara regional dan multilateral misalnya dengan telah disepakatinya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Walaupun tahun-tahun awal periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung dalam pelaksanaan kebijakannya lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur yang masif, namun masih sejalan dengan arah kebijakan pada periode kedua yang memberikan peluang bagi masuknya investasi asing di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investasi yang masuk ke Indonesia mayoritas hanya di daerah atau pulau tertentu adalah karena infrastruktur yang memadai terfokus di daerah tertentu tersebut. Sehingga, dengan telah dipersiapkannya infrastruktur di Indonesia pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, maka pada periode kedua, dianggap sudah lebih siap dalam mengundang investasi yang akan masuk ke Indonesia dan dalam masa periode kedua ini tampak dengan jelas bagaimana Indonesia mulai aktif dalam mengusung beberapa kerja sama ekonomi (Eve, 2016).

Posisi Indonesia di dalam forum Regional ASEAN memiliki peran yang sangat penting. Menjadi salah satu dari pendiri awal ASEAN bersama dengan empat negara lainnya yaitu Philipina, Thailand, Malaysia dan Singapura melalui Deklarasi Bangkok yang disepakati oleh negara anggota forum tersebut tanggal 8 Agustus 1967. Indonesia dengan beberapa negara tersebut membentuk ASEAN dengan latar belakang diataranya persamaan letak wilayah atau secara geografis, persamaan lain yang diidentifikasi dengan kemiripan warna kulit, kebiasaan, serta adat dan istiadat, beberapa negara mengalami persamaan nasib karena pernah merasakan penjajahan oleh bangsa asing dan juga adanya persamaan kepentingan yakni keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia saat ini tumbuh menjadi negara yang memiliki peranan signifikan dalam upaya memajukan Kawasan ASEAN yang saat ini telah beranggotakan 10 negara. Indonesia tumbuh menjadi negara yang dengan populasi sekitar 279.476.346 (CIA Worldfact book, 2023) menjadikan Indonesia menempati sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Dengan profil tersebut menjadikan Indonesia sebagai mitra kerja sama yang berprospek bagi negara lain. Dalam kawasan ASEAN, negara Malaysia menjadi salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai kompetitor Indonesia untuk interaksi ekonomi dengan Chile. Malaysia telah memiliki *Free Trade Agreement* dengan Chile yang mulai berlaku 2012. Untuk tahun 2013 malaysia menjadi mitra dagang ke 33 di Chile.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai korelasi antara kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi yang salah satunya menitikberatkan pada diplomasi ekonomi

sebagai upaya Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia yang salah satunya adalah meningkatkan perekonomian yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan upaya Indonesia dalam menembus pasar Amerika Selatan yang diawali dengan kerja sama ekonomi dengan Chile walaupun dengan beberapa fakta pendukung yaitu Chile bukan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dalam Kawasan Amerika Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Chile khususnya dalam sektor perdagangan mengalami dinamika yang fluktuatif dengan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 hampir selalu defisit dan mulai meningkat setelah tahun 2017. Dari gambaran tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis

1. Mengapa Indonesia dan Chile menjalin kerja sama ekonominya dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement*?
2. Bagaimana Indonesia-Chile CEPA diimplementasikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Menjelaskan perspektif neoliberalisme yang menjadi dasar dari penelitian ini dengan menghubungkan *rationale* dari pembentukan kerjasama Indonesia

dengan Chile dalam kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan proses pelebagaan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Chile.

2. Menjelaskan tindak lanjut atas kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Chile di masing-masing negara serta menjelaskan pengaruh kerjasama tersebut dalam interaksi ekonomi antara Pemerintah dengan berbagai aktor. Salah satu aktor yang mendapatkan manfaat adalah industri kendaraan bermotor di Indonesia.

Sehingga, penelitian ini penulis harapkan dapat menggambarkan dengan lengkap dan mendalam perihal kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Chile dalam upaya memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara serta upaya yang dapat dilakukan oleh kedua negara dalam meningkatkan pertumbuhannya melalui potensi sektor lain yang akan dijajaki.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis bagi menjadi dua jenis manfaat yang ingin dicapai, pertama manfaat secara akademik dan kedua yaitu manfaat secara praktis. Manfaat akademik diperoleh melalui pemberian informasi terkait dengan hubungan bilateral Indonesia dengan Chile terutama dalam bidang ekonomi yang dilakukan melalui transaksi perdagangan barang serta potensi dalam sektor lain misalnya perdagangan jasa yang merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis untuk ilmu Hubungan Internasional khususnya terkait dengan pembahasan mengenai

Neoliberalisme, kerja sama internasional baik secara studi Kawasan maupun kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Chile.

Selain manfaat akademis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis berupa informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar atau praktik dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta pelaku usaha seperti perusahaan dan individu yang dilakukan dalam kerangka kerja sama CEPA.

1.5 Sistematika Penulisan

1. 1 BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang Indonesia dan Chile dalam upaya meningkatkan hubungan diplomatiknya yang dilakukan melalui kerangka kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak aktor.

2. BAB II: Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan penulis agar dapat mendapatkan gambaran umum mengenai tema penelitian yang dipilih. Sedangkan kerangka pemikiran berisikan teori serta konsep-konsep yang akan membantu penulis dalam membedah tema penelitian ini secara ilmiah dan komprehensif. Kerangka teori dalam penelitian ini akan dimulai dengan terdapatnya *common interest* diantara kedua negara, dilanjutkan dengan kerja sama ekonomi yang dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor, kemudian kedua negara sepakat untuk melembagakan

kerja sama tersebut dalam bentuk CEPA yang berisikan norma dan ketentuan, kemudian pelaksanaan atas CEPA tersebut melibatkan banyak *channels* dan aktor dalam kedua negara.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan oleh penulis dan menjelaskan alasan pemilihan pendekatan tersebut tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjadi panduan penulis dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang diperlukan sebagai pendukung penelitian ini.

4. BAB IV: Analisis

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yakni perspektif Neoliberalisme dengan beberapa konsep turunannya diantaranya teori kerja sama dan *interdependence* beserta konsep-konsep pendukung yang digunakan dalam menganalisis data serta dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan terkait dengan tema kerja sama Indonesia-Chile melalui kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

5. BAB V: Kesimpulan

Bab ini memberikan rangkuman dari keempat bab sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan penegasan kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini penulis menyampaikan saran yang diharapkan dapat membantu memberikan rekomendasi dalam upaya optimalisasi kerja sama yang telah

dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi-potensi kedua negara dan manfaatnya bagi kesejahteraan kedua negara di masa mendatang.

